

# Pemberdayaan Perwiridan dalam Komunitas Nelayan Melayu untuk Memberhasilkan Pelaksanaan Otonomi Daerah

**Chalida Fachrudin**  
( *Universitas Sumatera Utara* )

## Pendahuluan

Membaca kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang kemudian membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dalam satu gugusan kepulauan Indonesia Raya adalah membuka misteri besar mengapa keragaman dan kebhinekaan yang berkembang dalam kotak-kotak nilai (*value boxes*) akar kultural dapat menyatu pada satu nilai baru dengan semangat kebangsaan: Republik Indonesia, sebagian besar adalah langkah menumbuhkan satu sikap yang makin teguh, agar kesatuan Indonesia tetap utuh terjaga dalam satu tatanan yang kuat, makmur, adil, dan bermartabat (Noer 1995 : 3-4 ). Namun, pada masa Orde Baru yang terkenal dengan orde pembangunan itu keberagaman dan kebhinekaan itu diredam. Gaya pembangunan Orde Baru yang bercirikan secara kental terlihat antara lain pada kecendrungan sentralisasi dan otoritarianisme kekuasaan rezim yang dimanifestasikan kedalam praktek pembangunan yang lebih mengedepankan

segi keseragaman (*uniformity*) dan dominasi negara (*state*) terhadap rakyat (*civil society*). Praktek pembangunan semacam ini cenderung mengabaikan data bahkan berlawanan dengan kondisi objektif empiris, kebhinekaan masyarakat dan kebudayaan Indonesia (Manan & dkk 1999). Seyogyanya setiap etnis, kelompok bahkan manusia sebagai individu pasti mempunyai perbedaan yang harus dihargai. Justru perbedaan yang dimiliki umat manusia inilah yang mendorong dinamika dan stabilitas kehidupan manusia (Sumaatmadja 1998:18). Kondisi amat diperlukan demi kelanjutan pembangunan bagi kesejahteraan umat manusia sebagai satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa *survive* menghadapi tantangan alam dan sosial yang berasal dari perbuatan manusia juga.

Memang dengan sentralisasi dan otoritarianisme yang ditopang dengan Dwi fungsi ABRI, pemerintah Orde Baru membuat proses pembangunan relatif baik. Namun komunikasi pembangunan hanya satu arah saja dengan model pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah (Sutrisno 1995 : 32), kebijaksanaan pembangunan yang dilahirkan, sejak perencanaan sampai pada evaluasi sepenuhnya berada ditangan birokrat dan tehokrat (Suwarsono & Alvin 1991: 170). Kenyataan menunjukkan bahwa menjelang abad ke-21 masalah partisipasi rakyat dalam pembangunan menjadi masalah strategis yang perlu ditekuni secara serius oleh pimpinan negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Konsep partisipasi sebagai strategi pembangunan terkandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek pembangunan (Sutrisno 1995: 230-237).

Akhirnya pemerintah Orde Baru tidak dapat bertahan, runtuh dilanda .reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan cendekiawan. Masalah lama yaitu ketidakpuasan daerah terhadap dominasi pemerintah pusat seperti pada masa 1950-1960-an mencuat kembali, disintegrasi bangsa mulai mengancam, apalagi dengan terlepasnya Timor-Timur dari Indonesia. Untuk mengantisipasi itu lahir Undang-undang no. 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah. Walau tidak secara jelas tertulis namun Undang-Undang tersebut mengandung substansi pengakuan terhadap pranata atau institusi lokal sebagai satuan sosial yang dapat menjadi basis pelaksanaan otonomi tersebut. Dengan kata lain ketentuan mengenai otonomi itu memberi peluang bagi revitalisasi pranata atau institusi lokal yang berbasis komunitas. Sehingga prinsip-prinsip pembangunan berparadigma baru yang lebih partisipatif (*participatory development* dan *community-based resource management*) menjadi sesuatu yang mungkin untuk diwujudkan di masa depan. Diharapkan bahwa otonomi daerah itu akan kembali membuat rasa persatuan dan kesatuan karena setiap daerah dapat mengembangkan potensi untuk menyalurkan aspirasi masing masing. Dengan demikian perlu pengembangan konsep kemandirian wilayah yang anti-sentralisme, yang merupakan alternatif guna menangkal krisis ekonomi yang

terus berlangsung di Indonesia. Konsep dan paradigma kemandirian wilayah mensyaratkan sistem pemerintahan di daerah yang demokratis, otonom dan bertanggung jawab dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, menjamin terlaksananya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil seimbang dan saling membutuhkan (Mattulada 1999 : 9-10).

### Perwiridan sebuah pranata sosial khas Medan

Kotamadya Medan sebagai ibukota propinsi Sumatera Utara dikenal sebagai kota yang penduduknya terdiri dari beragam etnis, agama dan budaya yang merupakan cerminan dari kebhinekaan Indonesia. Hampir semua etnis, keturunan dan bangsa asing ditemui disini. Sekalipun tanpa pendatang Sumatera Utara memang memiliki masyarakat majemuk karena penduduk aslinya saja ada 8 etnis yaitu: Melayu, Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias, Mandailing, dan Pesisir.

Ketika Guru Patimpus membuka kampung Medan 410 tahun yang lalu kampung tersebut didiami oleh orang Melayu dan orang Karo. Terbukanya tanah Deli menjadi kawasan perkebunan yang masih ada sampai sekarang dan merupakan Sumber daya alam yang berpotensi besar untuk propinsi Sumatera Utara, mengembangkan kota Medan menjadi kota yang majemuk seperti dikatakan diatas. Namun di Medan tidak ada satu etnis pun yang dominan, hatta orang Jawa sebagai kelompok mayoritas. Setiap etnis di Medan dapat hidup untuk bersaing, yang menguntungkan masing-masing (Suparlan 1999:19). Mereka bebas hidup dalam masing-masing budaya kelompoknya. Tetapi terjadi juga saling menyerap atau mengambil budaya kelompok lain. Budaya etnis yang diserap itu tidak mendominasi etnis yang mengambalnya, karena unsur yang diambil itu kadang kala dianggap sebagai milik sendiri. Kasus ini banyak terjadi dengan unsur budaya Melayu sebagai salah satu penduduk asli Medan atau Sumatera Utara. Seperti "tepung tawar dan balai" adalah unsur kebudayaan Melayu, tampaknya sudah di akui oleh kelompok-kelompok migran di Medan sebagai milik budaya yang di pakai mereka dalam kehidupan sosialnya. Begitu juga kelompok perwiridan sebagai pranata sosio-religius yang semula hanya ada pada kehidupan sosial orang Melayu, sekarang sudah lazim ditemukan pada komunitas-komunitas Muslim di Sumatera Utara.

Di Kotamadya Medan kelompok perwiridan ini terdapat hampir disemua kecamatan yang berpenduduk Muslim dan keberadaannya biasanya terkait dengan satuan-satuan pemukiman terkecil dalam struktur pemerintahan desa atau kelurahan yang disebut lingkungan. *Keguyuban* atau kebersamaan yang terbangun antara para anggota kelompok perwiridan berkembang karena didasarkan kepada ajaran agama yang fokusnya pada pembacaan *Surah*(surat) Yasin dari Al Qur'an. Hal ini bukan sesuatu yang aneh, sebab menurut Durkheim (Baal 1987: 213), bahwa gagasan religius yang sesungguhnya adalah milik seluruh persekutuan yang mempersekutukan para anggotanya dalam kenyataan bahwa

mereka membayangkan yang sakral dan hubungan yang sakral dan yang profan itu dengan yang profan dengan cara yang sama. Mereka mengucapkan keyakinan mereka secara bersama dalam ritus yang sama.

Di Sumatera Utara dan kota Medan terdapat juga pranata yang berdasarkan agama selain Islam tetapi dalam satu kelompok etnis, misalnya Partangiangan pada wanita Batak Toba yang beragama Kristen Protestan. Sedangkan Perwiridan dapat menghimpun berbagai etnis dalam pemukiman yang terdapat dalam satu pemukiman. Bahkan demi pergaulan dan solidaritas sosial sekarang banyak orang-orang dari kelompok "Kaum Muda" turut menjadi anggota perwiridan. Apalagi dalam pertemuan kelompok perwiridan di perkotaan di Sumatera Utara khususnya Medan tidak hanya Wirid Yasin saja yang diamalkan tetapi diikuti dengan tablig dan aktivitas agama dan sosial yang lain. Dengan demikian perwiridan yang secara faktual terwujud dalam rasa kebersamaan dan solidaritas kelompok, merupakan suatu potensi sosio kultural yang dapat di daya gunakan untuk memberdayakan komunitas lokal (lingkungan) di dalam arena sosial yang lebih luas termasuk dalam kehidupan bernegara.

### Perwiridan dalam komunitas nelayan Melayu di Labuhan Deli

Penulis mengamati selama satu tahun dalam sebuah komunitas yang menempati kawasan pesisir wilayah Kodya Medan yaitu kelurahan Labuhan Deli kecamatan Medan Marelan. Perwiridan amat berperan dalam kehidupan komunitas yang mayoritas penduduknya adalah orang Melayu yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Bagi orang Melayu termasuk yang berada di kawasan tersebut diatas, konsep ibadah ialah melaksanakan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai penganut Islam mereka sudah pasti wajib melaksanakan Rukun Islam. Namun dari Rukun Islam yang lima itu hanya tiga yang mampu ditunaikan oleh orang-orang Melayu di Labuhan Deli, yaitu syahadat, sholat dan puasa (Fachrudin 1998). Kondisi ekonomi dari komunitas yang warganya hidup dengan penghasilan yang amat terbatas itu menyebabkan mereka belum atau tidak mampu melaksanakan Rukun Islam yang keempat dan kelima yaitu zakat dan naik haji. Oleh karena itu, membaca Al Qur'an merupakan suatu ibadah yang penting terutama membaca Surat Yasin. Surat Yasin ini bukan dibaca perseorangan tetapi secara bersama yang disebut Wirid Yasin. Wirid Yasin ini bermula dari kebiasaan membaca Surat Yasin secara bersama-sama setiap malam Jum'at. Tradisi ini merupakan ibadah pengikut Mazhab Syafi'i khususnya masyarakat Melayu Sumatera Timur ( Melayu Deli ). Wirid Yasin ini dengan beberapa tradisi Melayu seperti : kenduri arwah memayungi jenazah, berdoa, menabur bunga dan air mawar diatas kubur adalah masalah Khilafiyah yang menjadi sumber konflik antara kaum Tua dan kaum Muda di Sumatera Timur (Sumatera Utara sebelum kemerdekaan Indonesia

bernama Sumatera Timur) (Syaifuddin 1988: 101-108).

Wirid Yasin ini mempunyai pola dan tata cara pelaksanaannya yang sama pada setiap kelompok perwiridan. Pembacaan Surat Yasin dipimpin oleh ketua wirid atau orang-orang yang dianggap mampu. Berkemampuan maksudnya fasih membaca Al-Qur'an dan membaca do'a, karena orang yang sedemikian diyakini makbul doanya. Biasanya seorang ketua Perwiridan harus orang yang berkemampuan seperti yang disebutkan di atas. Membaca Al-Qur'an secara bersama itu dengan keyakinan ada diantara anggota atau yang hadir doanya diperkenankan Tuhan.

Disamping itu dosa karena kesalahan membaca Al-Qur'an Pemahaman seperti di atas itulah yang mendorong orang tua dalam komunitas nelayan ini lebih menjadi tanggung jawab bersama. mengutamakan anaknya belajar membaca Al-Qur'an daripada membaca hurup Latin. Merupakan kebanggaan bagi ibu bapak apabila anaknya fasih membaca Al-Qur'an yang diperlihatkan pada upacara khatam Qur'an. Upacara tersebut diusahakan sedapat mungkin dilaksanakan walaupun biaya untuk itu dengan bersusah payah diperoleh.

Pada umumnya anggota perwiridan tidak memahami apa makna Surat yang dibacanya. Ibadah tersebut merupakan tradisi yang mereka terima dari orang tuanya, bahwa dengan membaca Surat Yasin itu mereka telah mengadakan hubungan transedental dengan Tuhan dan berharap akan memperoleh perlindungan di akhirat kelak. Sama seperti ibadah sholat dan puasa amalan membaca Surat Yasin ini memberi kepuasan dan ketentraman bagi orang Melayu dimana saja mereka berada. Bahkan kaum ibu selalu membawa anak mereka yang masih balita kepertemuan Wirid Yasin sebagai salah satu cara orang Melayu mensosialisasi anaknya, agar menjadi seorang Muslim.

Di Kelurahan Labuhan Deli perwiridan ditemui pada setiap Lingkungan. Dalam suatu Lingkungan minimal 4 kelompok yaitu kelompok kaum ibu, kaum bapak, remaja putera dan remaja puteri, masing-masing terdiri lebih kurang 30-50 orang. Perwiridan itu masing-masing mempunyai nama seperti Al Munawarah, Silaturahim, Al Huda dan lain-lain. Aktivitas masing-masing kelompok secara rutin melaksanakan Wirid Yasin pada hari yang telah disepakati bersama. Pada umumnya kelompok kaum bapak pada malam Jumat, remaja putera melaksanakannya pada malam Minggu. Sedangkan, kaum ibu dan remaja puteri pada siang hari Jum'at atau hari lain. Aktivitas dilaksanakan secara bergilir di rumah anggota perwiridan. Selain itu kelompok perwiridan merupakan undangan khusus pada setiap aktivitas sosial yang pada umumnya berkaitan dengan ritual *lifecycle*. Dalam komunitas ini sebuah upacara ritual tidak lengkap atau tidak sah kalau tidak mengundang kelompok perwiridannya, terutama bagi anggota yang aktif. Begitu juga bagi anggota yang selalu absen, biasanya kaum bapak karena harus melaut. Partisipasinya dalam kelompok dengan tetap membayarkan iuran atau menerima giliran kelompok perwiridan di rumahnya. Menurut pemahaman kaum nelayan Melayu di kawasan

Labuhan Deli, pahala ibadah Wirid Yasin ini akan di perolehnya, walaupun tidak dapat langsung menghadiri, memadai dengan berbuat seperti yang disebut diatas.

Kelompok perwiridan mempunyai pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Tetapi semua anggota dalam kedudukan yang sama dan setaraf (egaliter). Para anggota diwajibkan membayar iuran bulanan. Selain itu apabila terjadi kemalangan, perkawinan dan kelahiran anak dari anggota, dikutip uang sesuai dengan kemampuan anggota. Tetapi ada juga kelompok perwiridan yang menetapkan jumlah uang kutipan. Kelompok perwiridan kaum ibu iuran bulanan pada umumnya untuk membeli piring, gelas dan benda lainnya untuk keperluan kenduri. Benda-benda tersebut biasanya boleh dipergunakan oleh anggota dengan gratis. Sedangkan kelompok kaum bapak, remaja putera-puteri, iuran tersebut selalu digunakan untuk membayar honor ustad, bila perwiridan tersebut mengadakan tablig. Uang iuran tersebut juga dapat di gunakan untuk membantu para anggota yang memerlukan dana, dan kadang-kadang di kutip lagi sebagai tambahan. Kebersamaan menghadapi kesenangan dan kesusahan menjadi salah satu pendorong bagi masyarakat yang bermukim dalam komunitas nelayan Melayu ini menjadi anggota perwiridan. Namun yang paling hakiki yang menjadi tujuan utama menyertai perwiridan adalah kepentingan Ibadah.

Kelompok-kelompok perwiridan ini sering dimanfaatkan oleh pegawai kelurahan untuk menginformasikan program pemerintah seperti keluarga berencana atau pengumuman yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi lebih praktis dan tidak perlu surat edaran, cukup melalui ketua wirid saja, informasi sudah sampai kepada masyarakat Kelurahan Labuhan Deli.

Bagaimanapun sebelum acara di mulai para anggota baik perwiridan kaum bapak atau ibu-ibu tentunya remaja putera dan puteri saat menanti kehadiran anggota lain mengobrol satu sama lain. Pembicaraan antara lain mengenai kehidupan mereka sehari-hari dan perkembangan Kelurahan Labuhan Deli sebagai bagian kota Medan yang sedang giat membangun menuju Kota Metropolitan. Tetapi mereka adalah rakyat kecil yang hanya dapat sebagai penonton saja yang menanti waktu untuk tergusur atau menepi, sebagai dampak pembangunan kota. Mengenai pembangunan atau segala permasalahan dan kelurahan terdapat sebuah institusi formal sebagai wadah yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada pada setiap desa di Indonesia, berdasarkan Keppres no. 28 tahun 1980. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa keberadaan LKMD sebagai perwujudan masyarakat untuk masyarakat LKMD berfungsi untuk membantu pemerintah desa atau kelurahan melaksanakan pembangunan. Lurah sebagai ketua LKMD dan anggotanya dari masyarakat. LKMD diharapkan dapat sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah menjadikan desa atau kelurahan menjadi kuat

yang disebut “ketahanan”. Tetapi kenyataannya institusi pemerintah ini dan juga lain seperti PKK, Karang Taruna tidak populer dikalangan masyarakat nelayan Melayu di Labuhan Deli, sebab pengurus dan anggota institusi-institusi tersebut adalah pilihan Lurah sebagai orang pemerintah yang melaksanakan program yang telah direncanakan oleh pemerintah. Bagi kaum nelayan di Labuhan Deli wadah mereka untuk berkumpul adalah “Perwiridan”, dimana mereka bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa mengurangi kesakralannya beribadah.

Sudah menjadi rahasia umum program pemerintah adalah proyek yang direncanakan dan dilaksanakan tanpa melibatkan rakyat dan belum tentu sesuai dengan kepentingan rakyat kecil. Contohnya pemukiman nelayan di Labuhan Deli termasuk dalam sebuah proyek yang di sponsori oleh pemerintah pusat dengan PEMDASU yang terkenal dengan *Medan Urban Development Project (MUDP)*. Secara fisik dalam beberapa tahun saja kawasan Labuhan Deli berubah, diantaranya sebuah jalan yang beraspal beton melintasi Labuhan Deli menggantikan jalan tanah. Dengan membaiknya jalan maka pemukiman nelayan yang kumuh itu menjadi sasaran pendatang yang bekerja di Belawan (pelabuhan) yang jauhnya hanya 6 kilometer dari Labuhan Deli. Kawasan ini amat strategis untuk tempat tinggal karena harga tanah dan PBB masih rendah dibandingkan dengan kawasan lain di kota Medan. Akhirnya banyak para nelayan yang menjual tanahnya atau tidak dapat lagi menyewa tanah tapak rumah, karena kalah bersaing dengan penyewa dari luar. Kasus lain yang memperlihatkan bahwa pembangunan untuk rakyat di Labuhan Deli hanya untuk proyek para birokrat seperti pengentasan kemiskinan melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kelurahan Labuhan Deli termasuk salah satu desa termiskin mendapat bantuan IDT. Bantuan yang diberikan kepada desa nelayan ini sama dengan desa petani yaitu pembudidayaan ternak secara bergulir. Tentu saja akhirnya proyek ini gagal karena nelayan tidak tahu atau tak pernah memelihara ayam dan kambing, kecuali menangkap ikan.

Walikota Medan sebelum yang sekarang berasal dari Labuhan Deli menaruh perhatian yang besar terhadap kehidupan nelayan. Beliau ingin memperbaiki kualitas hidup nelayan dengan membangun pemukiman yang sehat, yaitu Perumahan Kampung Nelayan Indah. Tetapi, beliau tidak menyadari bahwa keperluan nelayan saat ini bukan rumah yang teratur dan bersih, tetapi sumber kehidupan mereka di laut sudah terganggu seperti beroperasinya “pukat harimau”, kerusakan lingkungan perairan Selat Malaka karena limbah industri dan tambak. Akhirnya, Perumahan Kampung Nelayan Indah hanya nama saja, bukan dihuni oleh nelayan.

### **Potensi perwiridan dalam rangka otonomi daerah**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa selama ini Perwiridan sebagai pranata lokal lebih fokus pada aspek sosial religi, padahal bila dilihat unsur-unsur yang ada di-

dalamnya dapat ditransformasikan kepada aspek-aspek lain yang lebih luas manfaatnya. Seperti aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Berikut ini unsur-unsur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.

Salah satu aspek yang menonjol dari Perwiridan di Kota Medan keluarga masyarakat nelayan Labuhan Deli adalah tingginya tingkat solidaritas diantara anggotanya. Hal ini terbukti dari kerjasama yang erat dan tingginya nilai gotong royong dalam kelompoknya. Misalnya pada upacara-upacara lingkaran hidup (*life-cycle*) seperti pada saat melahirkan, perkawinan dan kematian.

Pada saat kelahiran anak, anggota Perwiridan menyumbang sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing anggota. Jenis sumbangan dapat berupa sembako, seperti beras, gula dan lauk-pauk atau uang, tergantung kesepakatan bersama dan keperluan anggota yang melahirkan. Untuk upacara perkawinan, selain menyumbang berupa uang dan *natura*, anggota juga turut menyumbang tenaga atau pikiran mulai dari persiapan hingga pelaksanaan upacara. Hal yang sama berlaku pada upacara kematian. Sebenarnya sumbang - menyumbang ini tidak terbatas pada tiga aspek diatas saja tapi juga peristiwa-peristiwa lain seperti: peristiwa kecelakaan, sakit dan musibah lainnya yang sifatnya kadang kala.

Satu aspek yang menarik lagi dari Perwiridan ini adalah hilangnya unsur sara, karena anggotanya terdiri dari antar golongan dan antar etnis satu sama lain kelihatannya tidak berbeda dalam hak dan kewajiban. Semua anggota berhak mendapat bantuan dan memenuhi kewajiban. Kewajiban ini sifatnya sukarela tetapi semua anggota Perwiridan merasa terpenggil untuk memenuhinya. Misalnya untuk hadir pada setiap pertemuan, memberikan sumbangan dengan ikhlas apabila ada anggota yang mengalami musibah dan memerlukan bantuan.

Walaupun kelompok-kelompok Perwiridan ini merupakan sebuah organisasi massa tetapi belum ada memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Namun demikian diantara anggota terjalin hubungan yang erat tingginya tingkat partisipasi pada tingkat komunitas dan intensitas anggota serta tingginya rasa memiliki, merupakan suatu hal yang kondusif dari Perwiridan seperti yang dijelaskan.

Dalam aspek ekonomi Perwiridan pada masyarakat di Kota Medan mengenal adanya sistem menabung yang disebut arisan. Jenisnya dapat berupa uang, barang atau jenis lainnya. Misalnya Perwiridan Almunawarah di Labuhan Deli tabungannya berupa beras dan gula. Pada saat wiridan yang berlangsung sekali seminggu masing-masing anggota membawa 1 muk beras dan ¼ kg gula kemudian pengurus yang mengumpulkannya untuk dititipkan di kedai sampah atau warung terdekat. Pada saat bulan puasa dan lebaran tiba hasil arisan ini kemudian diambil pengurus untuk kemudian dibagikan secara merata kepada masing-masing anggota. Pada kelompok Perwiridan di kawasan perkotaan di Medan dan ditempat lain di Sumatera Utara arisan kelompok

ini selalu berupa uang minimal Rp. 10.000/anggota setiap bulan. Kemudian ditabung di bank menunggu Hari Raya Idul Fitri tiba, untuk kemudian diambil dan dibelikan kerbau atau lembu untuk dibagikan kepada anggota. Dengan demikian anggota terbantu secara ekonomi pada saat hari raya tersebut.

Bila dikaitkan dengan perberdayaan perwiridan dalam aspek ekonomi, sebenarnya kebiasaan menabung (arisan) ini bisa ditransformasikan pada program ekonomi dalam rangka otonomi daerah dengan memperluas jenis kegiatan yang termasuk dalam aspek ekonomi. Dalam hal ini unsur-unsur dalam perwiridan tinggal dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi.

Dalam pengambilan keputusan dan wacana-wacana kerja ke depan ternyata kelompok Perwiridan lebih mengutamakan dialog. Artinya keputusan – keputusan selalu melalui proses musyawarah anggota (*bottom up*) dan tidak secara *top down* in pengurus. Bila dikaitkan dengan demokratisasi berarti cukup kondusif karena diselaraskan pada aspirasi dan kemauan anggota (*grass root*). Misalnya, pada pembentukan pengurus menentukan jenis sumbangan pada peristiwa-peristiwa tertentu, dan aktivitas lainnya.

## Penutup

Pemerintah Kotamadya Medan saat ini sudah siap untuk merealisasi UU no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, melalui keterangan Walikota dan Sekda Kotamadya Medan di media massa dalam rangka HUT ke-410 Kota Medan (Waspada 2000). Walikota Medan yang kebetulan baru bertugas beberapa bulan itu menjelaskan bahwa beliau telah melakukan kebijakan dini dengan memberdayakan kelurahan. Namun demikian kesiapan Pemda Kodya Medan hanya mementingkan kesiapan dari pihak pemerintah saja yaitu persiapan personil, persiapan peralatan dan persiapan pembiayaan. Pemerintah Daerah Kotamadya Medan masih bersikap seperti yang disebutkan Soetrisno (1995: 232-233) bahwa belum ada makna baku yang di berikan pada konsep partisipasi rakyat dalam pembangunan. Makna yang ada adalah makna yang dibentuk oleh pemerintah yaitu kemauan rakyat untuk mendukung pembangunan yang direncanakan pemerintah, baik dari segi dana dan semangat, rakyat hanya menerima saja, tanpa mereka ketahui manfaatnya.

Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan kelurahan terbagi atas beberapa lingkungan. Lingkunganlah sebenarnya merupakan ujung tombak pemerintahan kelurahan dengan Kepala Lingkungan atau Kepling sebagai penanggung jawab dan berperan aktif. Kelurahan Labuhan Deli sebagai sebuah kawasan di pinggiran kota Kepling bukan hanya sebagai pemimpin formal (petugas pemerintah) tetapi mereka juga seorang pemimpin informal. Diantara Kepling dengan masyarakatnya terjalin hubungan yang akrab. Hal ini disebabkan Kepling bukan pegawai negeri, dan taraf ekonominya tidak berbeda dengan pendudukan komunitas nelayan tersebut. Selain itu Kepling bertempat tinggal dalam

lingkungannya, sehingga Kepling memahami kehidupan dan masalah yang dihadapi oleh penduduk sehari-hari. Masyarakat nelayan di kawasan itu mendapat berbagai informasi tentang pembangunan kelurahan dari Kepling dalam pertemuan Perwiridan, karena Kepling juga anggota kelompok tersebut.

Dalam Perwiridan diantara pengurus dan anggota tidak ada perbedaan kecuali ketaatan beragama yang ditandai dengan kefasihan membaca Al-Qur'an dan doa. Dalam hal ini Kepling dengan tugasnya sebagai orang pemerintah dan anggota masyarakat dapat sebagai mediator dan mendorong partisipasi rakyat dalam pemberdayaan masyarakat lingkungan sebagai bagian kelurahan.

Dengan demikian keberadaan kelompok Perwiridan sebagai pranata lokal dapat merupakan *entry point* yang potensial untuk menumbuhkan dan membangun kesadaran masyarakat dalam mengaktualisasikan hak-haknya sebagai bagian dari wilayah otonomi Kodya Medan, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial budaya, ekonomi maupun politik dalam menyongsong pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 segera dan harus diberlakukan demi integritas bangsa Indonesia. Sudah saatnya partisipasi rakyat dalam pembangunan menjadi perhatian semua pihak. Partisipasi rakyat harus didefinisikan sebagai kemauan rakyat untuk menciptakan pembangunan untuk masyarakat mereka sendiri (Soetrisno 1995:233).

Perwiridan sebagai sebuah pranata sosial yang dibentuk oleh masyarakat, tentu mampu meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Karena sebagai pranata lokal memiliki prasyarat kebudayaan dan sosial, yang mempunyai potensi yang dapat diberdayakan dalam usaha mengatasi berbagai kemelut yang dihadapi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kotamadya Medan dan Sumatera Utara sebagai bahagian bangsa Indonesia.

## Kepustakaan

- Fachruddin, Chalida  
1998 Labuhan Deli, Organisasi Sosial sebuah Komunitas Nelayan di Sumatera Utara Indonesia. Tesis PhD, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Malaysia.
- Mattulada, H.A.  
1999 'Kesukubangsaan dan Negara Kebangsaan di Indonesia. Prospek Budaya Politik Abad ke-21'. *Antropologi Indonesia* : 23 (58). Jakarta.
- Manan, Imran, Kalangie, Nico S. dan Winarto, Yunita T.  
1999 'Pembangunan Gaya Orde Baru dan Krisis Budaya: Suatu Pengantar'. *Antropologi Indonesia* 23 (59). Jakarta.
- Noer, U. Saefuddin  
1995 'Lima Langkah Kemandirian dalam Membangun Kemandirian Indonesia'. Editor Ibnu Hamad. *Forum Dialog Indonesia*. Jakarta.

Soetrisno, Loekman

1995 *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta :  
Penerbit Kanisius.

Sumaatmadya, H. Nursid

1998 *Manusia, Dalam Konteks Sosial, Budaya dan  
Lingkungan Hidup*. Bandung : CV Alfabeta.

Suparlan, P.

1999 'Kemajemukan, Hipotesis, Kebudayaan Dominan  
dan Kesukubangsaan'. *Antropologi Indonesia*:  
23(58). Jakarta.

Suwarsono dan J.So. Alvin

1991 *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indone-  
sia*. LP3ES. Jakarta.

Van Baal

1987 *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi  
Budaya*. Penerbit Gramedia. Jakarta.

Waspada

2000 Sabtu 1 Juli 2000